

**EFEKTIVITAS ANGGARAN KEUANGAN TAHUN 2010 s.d 2012
PADA KANTOR CAMAT TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ida Iriyanti, Elfreda A Lau, Mardiana

**Fakultas Ekonomi
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Ida.iriyanti@yahoo.co.id**

ABSTRACT

Budgeting in government agencies necessary for the implementation of the basic tasks and functions that are entailed by the Office of Government can be done well, so that the function of public service to the people who need the service can be guaranteed well. Budget to support the implementation of activities office if effectively organized and planned course will provide the maximum benefit. Performance Based Budgeting means linking each funding as outlined in activities with expected outputs and outcomes, including effectiveness in achieving the results of the output. Outputs and results are set forth in the performance targets for each unit of word. Effectiveness is a measure of the results of a task or goal attainment. Effectiveness means meeting performance targets set.

Head Office Tenggarong Seberang Kutai regency as one course required government agencies to devise and use the budget effectively obtained. Effectiveness in this case is the achievement of performance targets previously set as a benchmark the implementation of public service functions to the public performing well.

Formulation of the problem of this research is "Do Budget Financial Year 2010 till 2012 at Head Office Tenggarong Seberang Kutai regency had been carried out effectively."

The hypothesis of this study is the "is assumed that the financial budget of 2010 till 2012 at the Head Office Tenggarong Seberang Kutai regency has not been implemented effectively. "

The results of the analysis and the study showed that the realization of the budget reached 58.67 % in 2010, 64.47 % in 2011, and 76.19 % in 2012. Based on the above description of financial budgeting in 2010 till 2012 at Head Office Tenggarong Seberang districts in Kutai has not been effectively implemented through performance -based budgeting means that the hypothesis is accepted.

Keywords : Effectiveness , Budget and Finance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor tersebut. Salah satu penunjang suksesnya kegiatan perkantoran adalah tersedianya barang-barang sebagai pendukung terselesaikannya tugas-tugas operasional perkantoran.

Barang barang yang dimaksudkan di atas seperti alat tulis kantor (ATK), meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan local area network (LAN). Sebelum menyediakan barang-barang tersebut tentunya pihak manajemen kantor akan merencanakan anggaran yang akan di alokasikan untuk pengadaan atau belanja barang. Perencanaan anggaran tentunya akan mengedepankan prioritas kebutuhan kantor itu sendiri agar manfaat yang diperoleh lebih maksimal.

Anggaran yang terencana dengan baik tentunya akan memberikan manfaat yang maksimal untuk perusahaan, sementara anggaran yang tidak terencana dengan baik akan mengurangi nilai manfaat yang diperoleh. Anggaran yang disusun dengan baik dan cermat akan menjadi penuntun yang sangat berguna bagi keberhasilan operasional perusahaan. Untuk dapat menyusun anggaran baik, diperlukan berbagai pengetahuan dan kiat yang tepat.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efektivitas penyelenggaraan suatu efektivitas. Efektivitas adalah

perbandingan antara output dengan input. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efektivitas anggaran maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan. Dalam hal ini Kantor Camat Tenggara Seberang merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah anggaran keuangan tahun 2010 s.d 2012 pada Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan secara efektif.”

Melaksanakan penelitian yang harus ditentukan adalah tujuan dari penelitian tersebut agar tidak kehilangan arah sehingga penelitian dapat berjalan lancar, disamping itu juga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara penyusunan anggaran keuangan pada Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran Keuangan pada Kantor Camat Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 s.d 2012.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan aktivitas ekonominya itu, maka tidak dapat dielakan bila lembaga pemerintah juga membutuhkan jasa akuntans, baik untuk meningkatkan mutu pengawasannya maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Diantara para ahli masih banyak perbedaan dalam memberikan definisi, hal ini dikarenakan mereka memandang dari sudut yang berbeda-beda.

Akuntansi menurut L.M Samyryn (2001:1) memberikan pengertian akuntansi sebagai berikut : “Bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya”.

Menurut Halim dan Supomo (2000:3) akuntansi manajemen didefinisikan sebagai berikut : “Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen.

Adapun fungsi manajemen menurut Halim dan Supomo (2000 : 4) sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang, termasuk di antaranya adalah penetapan tujuan organisasi.
- b. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Pengendalian adalah proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengertian keuangan daerah menurut Mamesah (1995:16) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsure penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan daerah keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pembahasan manajemen keuangan daerah bertitik tolak dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan program kerja satu daerah dalam bentuk angka-angka.

1) Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Ekonomi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/T2007 tahun 2007

mengelompokkan anggaran menurut klasifikasi ekonomi ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja. Anggaran pada Kantor Camat Tenggara Seberang diberikan tiga jenis belanja untuk dikelola yaitu :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas didalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat

nilai kapitalisasi (nilai satuan barang kurang dari Rp 300.000,-).

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas (sesuai standar biaya umum), dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut M. Nafarin (2007:11), anggaran adalah : “Suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.”

Menurut Ellen Cristina (2002 : 1), anggaran adalah :

“suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang”.

Menurut Jhon F. Due (1977 :129)” *a budget be defined as a financial plan that serves as basic for expenditure decision making subsequent control expenditures*”.

Anggaran dirancang untuk memudahkan penentuan kegiatan pemerintah dalam memberdayakan pilihan masyarakat dengan memastikan perbandingan program-program yang bertentangan kedalam satu metode untuk pencapaian tujuan.

Menurut Abdul Halim (2004:224) efektivitas anggaran adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Pengertian realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:936) yaitu : “Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, scek wujud, kenyataan, pelaksanaan yang nyata.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi merupakan suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

PEMBAHASAN

Efektivitas anggaran merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan anggaran atau target yang ditentukan dikalikan 100% dan hasil yang dicapai dengan anggaran atau target yang ditentukan dikalikan 100%.

$$\text{Efektivitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi}}{100\%} \times \text{Anggaran}$$

$$\text{Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{100\%} \times \text{Sasaran (Target)}$$

Pembahasan lebih lanjut sampai kepada pemecahan dan penyelesaian permasalahan yang diangkat hingga dapat diketahui efektif atau tidaknya anggaran

keuangan tahun 2010 s.d 2012 pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dari laporan realisasi perkembangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran dan laporan Kinerja dengan menggunakan alat analisis yang telah dijelaskan.

Secara umum laporan perkembangan Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penggunaan anggaran belum efektif dilaksanakan oleh Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang baik (85 s.d 100%).
2. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang cukup baik (70 s.d <85%).
3. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang kurang baik (55 s.d <70%).
4. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang tidak baik (0 s.d <55%).

Berdasarkan data terdapat banyak kegiatan yang pencapaian sasarannya (target) belum dilaksanakan 100% atau dengan kata lain sasaran (target) belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang pencapaian sasaran (target) dibawah 100% bahkan jauh dibatas ukuran efektivitas dan kinerja kegiatan. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

a. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang baik (85 s.d 100%)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kegiatan yang realisasi sasaran (target) di atas 85% dan bahkan mencapai 100%, hal ini tentunya menunjukkan kinerja pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara belum efektif. Pencapaian sasaran (target) ini tentunya akan dapat menjadi gambaran untuk meningkatkan

penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pelayanan pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum dilaksanakan dengan baik.

b. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang cukup baik (70 s.d <85%)

Terdapat 2 kegiatan belanja pada tahun 2010 yang pencapaian sasaran (target) dinilai cukup baik. Pertama pada belanja pegawai sebesar 79%. Kedua belanja modal yaitu sebesar 79%. Pada tahun 2011 terdapat juga sasaran (target) yang pencapaiannya dinilai cukup baik, yaitu pada kegiatan belanja pegawai sebesar 83% dan pada tahun 2012 pencapaian sasaran (target) yang dinilai cukup baik yaitu pada belanja pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai sebesar 79% dan belanja modal sebesar 79%.

Hal tersebut berarti walaupun tidak mencapai secara maksimal tetapi kantor masih dapat beroperasi menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal, sehingga kinerja dari kantor masih dikatakan baik.

c. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang kurang baik (55 s.d < 70%)

Pada tahun 2010 s.d 2012 pencapaian sasaran (target) dinilai kurang baik (55 s.d 70%) yaitu pada belanja barang yang masing-masing sebesar 58% pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar 57% dan pada tahun 2012 sebesar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara belum maksimal berusaha memenuhi setiap sasaran (target) kegiatan yang ditetapkan sebelumnya untuk meningkatkan kinerja kantor dengan anggaran yang ada.

d. Pencapaian sasaran (target) kegiatan yang tidak baik (0 s.d < 55%)

Berdasarkan data di atas terdapat pencapaian sasaran (target) kegiatan yang tidak baik (0 s.d <55%) yaitu pada tahun 2011 pada belanja modal yang

pencapaiannya sebesar 31%. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sangat banyak tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilalui, dan memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan dana yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2011 sudah kurang sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Data dari laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap pencapaian sasaran (target) oleh kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2010 s.d tahun 2012. Berdasarkan pada data tersebut terdapat banyak kegiatan yang pencapaian sasarnya (target) belum dilaksanakan 100% atau dengan kata lain sasaran (target) belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang pencapaian sasaran (target) dibawah 100% bahkan jauh dibatas ukuran efektivitas dan kinerja kegiatan.

Melihat dari penelitian yang dilakukan secara keseluruhan penggunaan anggaran keuangan tahun 2010 s.d 2012 pada kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara belum disusun dan dilakukan secara efektif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja yang diperlihatkan dengan realisasi anggaran yang belum mencapai 85% dan sasaran (target) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan di atas 85%. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

memiliki anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang akan membiayai program-program kegiatan.

2. Secara umum penggunaan anggaran keuangan tahun 2010 s.d 2012 pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja, karena masih terdapat realisasi sasaran (target) kegiatan yang belum tercapai secara maksimal.
3. Pelaporan atas anggaran yang telah digunakan oleh Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilaksanakan setiap triwulan dengan tujuan mempermudah pemantauan pelaksanaan pencairan anggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan Kesimpulan penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penggunaan anggaran keuangan agar pencapaian atas sasaran (target) kegiatan dapat lebih ditingkatkan.
2. Perlu adanya koordinasi antara masing-masing bidang pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan anggaran keuangan sehingga tidak terjadi ketimpangan realisasi anggaran dengan pencapaian sasaran (target) kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.

Perusahaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Due F.Jhon dan Friedlaender Ann F., 1977, *Government Finance Economics of The public Sektor*, Richard D.Irwin. Inc. Homewood, Illinois.
- Halim Abdul., 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim Abdul., 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko T. Hani., 1999. *Manajemen*, Edisi 2, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hansen Don R. dan Mowen Maryanne M., 2000. *Managemen Accounting*, 5th Edition, South-Western College Publishing, Cincinatti Ohio.
- Mamesah D.J., 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Nafarin M., 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi 3, Salemba Empat.
- Nick Devas, 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Cristina Ellen, Fuad. M, Sugianto, dan Sukarno Edy., 2002 *Anggaran*